BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Perusahaan

4.1.1 Sejarah Perusahaan

4.1.1.1 Sejarah Bank Artha Graha

PT. Bank Artha Graha Internasional, Tbk., berkedudukan di Jakarta Selatan, semula didirikan dengan nama PT. Inter-Pacific Financial Corporation berdasarkan Akta Nomor 12 tanggal 7 September 1973, dibuat dihadapan Bagijo, S.H., pengganti dari Eliza Pondaag, S.H., Notaris di Jakarta, dengan ruang lingkup usaha sebagai lembaga keuangan bukan bank, dan Akta tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor Y.A.5/2/12 tanggal 3 Januari 1975, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 6 tanggal 21 Januari 1975 Tambahan Nomor 47.

Pada tanggal 10 Juli 1990, PT. Inter-Pacific Financial Corporation mencatatkan sahamnya pada Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya. Berdasarkan Akta Nomor 67 tanggal 19 Mei 1992, dibuat dihadapan Adam Kasdarmadji, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 10 tanggal 2 Februari 1993 Tambahan Nomor 591, PT. Inter-Pacific Financial Corporation berubah nama menjadi PT. Inter-Pacific Bank. Pada tanggal 24 Februari 1993, PT. Inter-Pacific Bank mendapatkan izin usaha sebagai bank umum dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 176/KMK.017/1993.

Berdasarkan Akta Nomor 44 tanggal 13 Juni 1997 juncto Akta Nomor 8 tanggal 15 Januari 1998, keduanya dibuat dihadapan Sri Nanning, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 70 tanggal 1 September 1998 Tambahan Nomor 5056, PT. Inter-Pacific Bank berubah nama menjadi PT. Bank Inter-Pacific, Tbk.

Pada tanggal 9 April 1999, PT. Bank Inter-Pacific, Tbk. Mengajukan permohonan pembatalan pencatatan (delisting) saham di Bursa Efek Surabaya, dan pada tanggal 19 April 1999, Bursa Efek Surabaya memberikan persetujuan atas permohonan pembatalan pencatatan tersebut.

Pada tanggal 14 April 2005, PT . Bank Inter-Pacific, Tbk. Telah menandatangani Akta Penggabungan Nomor 17, dibuat dihadapan Imas Fatimah, S.H., Notaris di Jakarta, dimana PT. Bank Artha Graha menggabungkan diri kedalam PT. Bank Inter-Pacific, Tbk. Penggabungan tersebut telah mendapat izin dari Bank Indonesia dengan Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 7/32/KEP.GBI/2005 tanggal 15 Juni 2005, dan berlaku efektif pada tanggal 11 Juli 2005.Berdasarkan Akta Nomor 27 tanggal 12 Juli 2005, dibuat dihadapan Imas Fatimah, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah mendapatkan izin dari Bank Indonesia dengan Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 7/49/KEP.GBI/2005 tanggal 16 Agustus 2005, PT. Bank Inter-Pacific, Tbk. berganti nama menjadi PT. Bank Artha Graha Internasional, Tbk. Perubahan tersebut telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 101 tangal 19 Desember 2006 Tambahan Nomor 13128.

4.1.1.2 Sejarah Bank Bukopin

Bank Bukopin yang sejak berdirinya tanggal 10 Juli 1970 menfokuskan diri pada segmen UMKMK, saat ini telah tumbuh dan berkembang menjadi bank yang masuk ke kelompok bank menengah di Indonesia dari sisi aset. Seiring dengan terbukanya kesempatan dan peningkatan kemampuan melayani kebutuhan masyarakat yang lebih luas, Bank Bukopin telah mengembangkan usahanya ke segmen komersial dan konsumer.

Ketiga segmen ini merupakan pilar bisnis Bank Bukopin, dengan pelayanan secara konvensional maupun syariah, yang didukung oleh sistem pengelolaan dana yang optimal, kehandalan teknologi informasi, kompetensi sumber daya manusia dan praktek tata kelola perusahaan yang baik. Landasan ini memungkinkan Bank Bukopin melangkah maju dan menempatkannya sebagai suatu bank yang kredibel. Operasional Bank Bukopin kini didukung oleh lebih dari 280 kantor yang tersebar di 22 provinsi di seluruh Indonesia yang terhubung secara real time on-line. Bank Bukopin juga telah membangun jaringan micro-banking yang diberi nama "Swamitra", yang kini berjumlah 543 outlet, sebagai wujud program kemitraan dengan koperasi dan lembaga keuangan mikro.

Dengan struktur permodalan yang semakin kokoh sebagai hasil pelaksanaan Initial Public Offering (IPO) pada bulan Juli 2006, Bank Bukopin terus mengembangkan program operasionalnya dengan menerapkan skala prioritas sesuai strategi jangka pendek yang telah disusun dengan matang. Penerapan strategi tersebut ditujukan untuk menjamin dipenuhinya layanan perbankan yang komprehensif kepada nasabah melalui jaringan yang terhubung secara nasional

maupun internasional, produk yang beragam serta mutu pelayanan dengan standar yang tinggi.

4.1.1.3 Sejarah Bank Bumi Arta

Bank Bumi Arta yang semula bernama Bank Bumi Arta Indonesia didirikan di Jakarta pada tanggal 3 Maret 1967 dengan Kantor Pusat Operasional di Jalan Tiang Bendera III No. 24, Jakarta Barat.

Pada tanggal 18 September 1976, Bank Bumi Arta mendapat izin dari Menteri Keuangan Republik Indonesia untuk menggabungkan usahanya dengan Bank Duta Nusantara. Penggabungan usaha tersebut bertujuan untuk memperkuat struktur permodalan, manajemen Bank, dan memperluas jaringan operasional Bank. Delapan kantor cabang Bank Duta Nusantara di Jakarta, Bandung, Semarang, Surakarta, Surabaya, Yogyakarta dan Magelang menjadi kantor cabang Bank Bumi Arta. Kantor cabang Yogyakarta dan Magelang kemudian dipindahkan ke Medan dan Bandar Lampung hingga saat ini.

Selanjutnya Seiring dengan Kebijaksanaan Pemerintah melalui Paket Oktober (PAKTO) 1988 di mana perbankan diberikan peluang yang lebih besar untuk mengembangkan usahanya, dan berkat persiapan yang cukup lama dan terarah dari pengelola Bank, maka pada tanggal 20 Agustus 1991 dengan persetujuan dari Bank Indonesia, Bank Bumi Arta ditingkatkan statusnya menjadi Bank Devisa.Bank Bumi Arta mulai melayani sendiri transaksi devisa di Kantor Pusat Operasional Jalan Roa Malaka Selatan sejak tanggal 2 Desember 1991 dan

hingga saat ini jaringan bank koresponden internasional Bank Bumi Arta mencakup sekitar 130 bank di berbagai benua di seluruh dunia.

Pada tanggal 10 Juni 1992, Kantor Pusat Operasional Bank Bumi Arta dipindahkan dari Jalan Roa Malaka Selatan No. 12 - 14, Jakarta Barat ke Jalan Wahid Hasyim No. 234, Jakarta Pusat. Untuk memudahkan pengenalan masyarakat terhadap Bank kami, maka pada tanggal 14 September 1992 dengan izin dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia nama Bank Bumi Arta Indonesia diganti menjadi Bank Bumi Arta.

Untuk memperkuat struktur permodalan, operasional Bank, dan pengelolaan Bank yang lebih profesional dan transparan, berprinsip pada Good Corporate Gorvanence dan Risk Management, maka pada tanggal 1 Juni 2006 Bank Bumi Arta melaksanakan Penawaran Umum Perdana (IPO/Initial Public Offering) dengan mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Jakarta sebanyak 210.000.000 saham atau sebesar 9,10% dari saham yang ditempatkan, sehingga sejak saat itu Bank Bumi Arta menjadi Perseroan Terbuka.

4.1.1.4 Sejarah Bank Bumiputera

Bank ICB Bumiputera, dahulu Bank Bumiputera, didirikan pada tanggal 12 Januari 1990 sebagai Bank public oleh AJB Bumiputera 1912, perusahaan asuransi tertua di Indonesia.

Bank telah berhasil melalui naik turunnya ekonomi Indonesia. Pada puncak krisis moneter tahun 1990 an, Bank bertahan sebagai Bank sehat dengan kategori A tanpa membutuhkan rekapitalisasi. Hal ini berkat kemampuan Bank dalam

mengelola operasional perbankan yang sehat berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik.

Di tahun 2002, Bank go public dan mendaftarkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia dengan kode saham "BABP".

Selama tahun 2004-2007 setelah terjadinya beberapa perpindahan saham, ICB Financial Group Holdings (ICBFGH), group usaha dari beberapa Bank dengan operasional global di 14 negara, menjadi pemegang saham mayoritas.

Di tahun 2009, dengan visi baru untuk menjadi Bank Ritel terkemuka, Bank Bumiputera, secara resmi berubah nama menjadi Bank ICB Bumiputera dengan logo dan identitas korporasi baru.

Bank ICB Bumiputera sekarang terus berkembang menjadi Bank komersial terkemuka dengan aspirasi menjadi Bank Ritel Terkemuka di Indonesia. Dengan produk dan layanan yang lengkap melayani nasabah dari segmen bisnis hingga consumer, Bank ICB Bumiputera memiliki jaringan cabang dengan operasional di kota-kota besar di Indonesia dan dengan akses ke jaringan global Bank dibawah ICBFGH.

Bank ICB Bumiputera telah mendapatkan penghargaan dan pengakuan seperti Trusted Company on Corporate Governance Perception Index pada tahun 2010, the Most Attractive Bank dari majalah Warta Ekonomi pada tahun 2011.

4.1.1.5 Sejarah Bank Central Asia (BCA)

PT BCA Finance berdiri pada tahun 1981 dengan nama PT Central Sari Metropolitan Leasing Corporation (CSML). Pada awal berdirinya, pemegang saham Perusahaan adalah PT Bank Central Asia dan Japan Leasing Corporation. Saat itu Perusahaan masih memfokuskan usaha pada pembiayaan komersial, seperti pembiayaan mesin-mesin produksi, alat berat dan transportasi.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 441/KMK.017/1995 tanggal 14 September 1995 dan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. KEP-034/KM.5/2006 tanggal 20 Februari 2006, Perusahaan memperoleh pembaharuan mengenai izin usaha dalam bidang usaha lembaga pembiayaan sehingga Perusahaan dapat melakukan kegiatan usaha sebagai lembaga pembiayaan yang meliputi pembiayaan konsumen, kegiatan sewa guna usaha, anjak piutang, dan usaha kartu kredit.

Selanjutnya pada tahun 2001 PT Central Sari Metropolitan Leasing berubah nama menjadi PT Central Sari Finance (CSF), diikuti dengan perubahan kepemilikan saham, dimana PT Bank Central Asia, Tbk (BCA) menjadi pemegang saham mayoritas, serta perubahan fokus usaha menjadi pembiayaan kendaraan bermotor, khususnya roda empat atau lebih. Terakhir, Sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.C-08091 HT.01.04.TH.2005, maka per tanggal 28 Maret 2005 PT Central Sari Finance telah berubah nama menjadi PT BCA Finance.

Seiring dengan perubahan nama tersebut, pertumbuhan BCA Finance pun semakin melesat tajam. Hal ini tercermin dari terus meningkatnya jumlah pelepasan

pembiayaan baru dan total asset kelolaan secara signifikan. Prestasi ini tidak terlepas dari dukungan penuh yang diberikan oleh Perusahaan induk kami yaitu PT Bank Central Asia, Tbk.

4.1.1.6 Sejarah Bank Danamon

PT Bank Danamon Indonesia Tbk. didirikan pada 1956. Nama Bank Danamon berasal dari kata "dana moneter" dan pertama kali digunakan pada 1976, ketika perusahaan berubah nama dari Bank Kopra.

Pada 1988, Bank Indonesia meluncurkan paket reformasi perbankan yang dikenal dengan "Paket Oktober 1988" atau PAKTO 88. Tujuan utama PAKTO 88 adalah untuk membangun kompetisi dalam sektor perbankan dengan memberikan kemudahan persyaratan, termasuk liberalisasi peraturan tentang pendirian bank swasta domestik baru dan bank joint-venture. Sebagai hasil dari reformasi ini, Bank Danamon menjadi salah satu bank valuta asing pertama di Indonesia, dan menjadi perusahan publik yang tercatat di Bursa Efek Jakarta.

Tumpuan Danamon untuk memenuhi semua kebutuhan nasabahnya tercermin dari pendekatan bisnis. Fokus perbankan yang universal, diimplementasikan pada tahun 2003 menentukan arah ekspansi bisnis Danamon ke depan. Pada akhir 2004, Danamon telah melengkapi rangkaian segmen usahanya, mulai dari mass market, perbankan komersial dan UKM, perbankan ritel, bisnis kartu kredit, perbankan syariah, perbankan korporasi, tresuri, pasar modal dan lembaga keuangan, serta Adira Finance. Pada 2004 Danamon juga membangun bisnis asuransi dan bisnis keuangan rumah tangga lewat Adira Insurance dan Adira

Kredit (dulunya Adira Quantum). Pembelian bisnis kartu American Express di Indonesia pada 2006 memposisikan Danamon sebagai salah satu penerbit kartu terbesar di Indonesia.

Sebagai *surviving entity* dari peleburan 9 Bank Taken Over (BTO) pada masa krisis keuangan Asia di akhir 1990-an, Danamon telah bangkit menjadi salah satu bank swasta terbesar dan terkuat di Asia. Didukung oleh lebih dari 50 tahun pengalaman, Danamon terus berupaya untuk memenuhi *brand promise*-nya untuk menjadi bank yang "bisa mewujudkan setiap keinginan nasabah". Saat ini Danamon adalah bank ke-enam terbesar di Indonesia berdasarkan aset, dengan jaringan cabang yang mencakup lebih dari 3,300 kantor cabang dan *point of sales*, termasuk unit Danamon Simpan Pinjam (DSP) dan unit Syariah, serta kantor-kantor cabang anak perusahaannya . Danamon juga didukung oleh serangkaian fasilitas perbankan elektronik yang komprehensif.

4.1.1.7 Sejarah Bank Eksekutif Internasional (Pundi)

PT Bank Pundi Indonesia Tbk (sebelumnya bernama PT Bank Eksekutif Internasional Tbk) (BEKS) didirikan 11 September 1992 dan memulai aktivitas operasi di bidang Perbankan pada tanggal 9 Agustus 1993. Kantor pusat BEKS berlokasi di Jl. Fatmawati No. 12 Jakarta. Pada saat ini BEKS memiliki 47 kantor cabang dan 156 kantor cabang pembantu.

Berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan BEKS bergerak dalam bidang keuangan dan pembiayaan. Saat ini BEKS berstatus Bank non devisa yang fokus pada pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

Pada tanggal 22 Juni 2001, BEKS memperoleh pernyataan efektif dari Bapepam-LK atas nama Menteri Keuangan Republik Indonesia untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham BEKS kepada masyarakat sebanyak 277.500.000 dengan nilai nominal Rp100,- per saham dengan harga penawaran Rp140,- per saham dan disertai 55.500.000 Waran seri I dan periode pelaksanaan mulai dari 13 Januari 2003 sampai dengan 12 Juli 2004 dengan harga pelaksanaan sebesar Rp175,- per saham. Saham dan Waran Seri I tersebut dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tanggal 13 Juli 2001.

4.1.1.8 Sejarah Bank Internasional Indonesia

PT Bank Internasional Indonesia Tbk (BII) didirikan 15 Mei 1959. Setelah mendapatkan ijin sebagai bank devisa pada 1988, BII mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya (sekarang Bursa Efek Indonesia atau BEI) pada tahun 1989. Sejak menjadi perusahaan publik, BII telah tumbuh menjadi salah satu bank swasta terkemuka di Indonesia.

Per 31 Maret 2013, sebesar 97,29% saham BII dimiliki oleh Malayan Banking Berhad (Maybank), grup keuangan terbesar di Malaysia.

BII merupakan salah satu bank terbesar di Indonesia dengan jaringan internasional yang memiliki 415 cabang termasuk cabang Syariah dan cabang luar negeri, 1.388 ATM termasuk CDM (Cash Deposit Machine) BII di seluruh Indonesia, dan juga terkoneksi dengan lebih dari 20.000 ATM yang tergabung dalam jaringan ATM PRIMA, ATM BERSAMA, ALTO, CIRRUS, dan jaringan MEPS Malaysia, sekaligus terhubung dengan 3.500 ATM Maybank di Malaysia dan

Singapura serta memiliki kantor luar negeri di Mauritius dan Mumbai (sedang dalam proses reaktivasi).

Per 31 Maret 2013, total simpanan nasabah sebesar Rp89,3 triliun dan total aset Rp118,3 triliun. BII menyediakan serangkaian jasa keuangan melalui kantor cabang, jaringan ATM, phone banking, mobile banking dan internet banking. BII tercatat di Bursa Efek Indonesia (BNII) dan aktif di sektor Perbankan UKM, Ritel, dan Global Wholesale.

4.1.1.9 Sejarah Bank Mayapada

PT Bank Mayapada Internasional Tbk (MAYA) didirikan 07 September 1989 dan mulai beroperasi secara komersial pada tanggal 16 Maret 1990. Kantor pusat MAYA berlokasi di Mayapada Tower Lt. 2, Jl. Jendral Sudirman Kav. 28 – Jakarta. Pada saat ini, MAYA memiliki 31 Kantor Cabang Domestik, 125 Kantor Cabang Pembantu, 16 Kantor Kas dan 1 Payment Point.

Berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan MAYA adalah menjalankan kegiatan usaha di bidang perbankan.

Pada tanggal 07 Agustus 1997, MAYA memperoleh pernyataan efektif dari Bapepam-LK untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham MAYA (IPO) kepada masyarakat sebanyak 65.000.000 dengan nilai nominal Rp500,- per saham dengan harga penawaran Rp800,- per saham. Saham-saham tersebut dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tanggal 29 Agustus 1997.

4.1.1.10 Sejarah Bank Mega

PT Bank Mega Tbk (MEGA) didirikan 15 April 1969 dengan nama PT Bank Karman dan mulai beroperasi secara komersial pada tahun 1969. Kantor pusat MEGA berlokasi di Menara Bank Mega, Jl. Kapten Tendean 12-14A, Jakarta. Pada saat ini, MEGA memiliki 120 Kantor Cabang dan 194 Kantor Cabang Pembantu.

Berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan MEGA adalah menjalankan kegiatan usaha di bidang perbankan.

Pada tanggal 15 Maret 2000, MEGA memperoleh pernyataan efektif dari Bapepam-LK untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham (IPO) MEGA kepada masyarakat sebanyak 112.500.000 dengan nilai nominal Rp500,- per saham dengan harga penawaran Rp1.200,- per saham. Saham-saham tersebut dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tanggal 17 April 2000.

4.1.1.11 Sejarah Bank Nusantara Parahyangan

PT Bank Nusantara Parahyangan Tbk (Bank BNP) berkedudukan di Bandung dan berkantor pusat di Jalan Ir. Juanda No. 95, Bandung - 40132, Indonesia, didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 47, tanggal 18 Januari 1972, yang dibuat dihadapan Komar Andasasmita, SH, Notaris di Bandung.

Bank BNP semula didirikan dengan nama PT Bank Pasar Karya Parahyangan yang berorientasi bisnis pada usaha retail, kemudian pada bulan Juli 1989 ditingkatkan statusnya menjadi Bank Umum Nasional dengan harapan dapat meningkatkan pelayanan jasa perbankannya lebih luas dan dapat membidik sector

ekonomi yang lebih besar lagi, sekaligus berganti nama menjadi PT Bank Nusantara Parahyangan.

Pada Agustus 1994, untuk melayani ragam transaksi dan akses perdagangan yang lebih luas khususnya untuk transaksi valuta asing dan perdagangan luar negeri melalui transaksi ekspor dan impor, maka Bank BNP melengkapi ijin operasionalnya dengan ijin sebagai Bank Devisa.

Tahun 2000 berdasarkan keputusan RUPSLB tanggal 15 September 2000, Bank BNP mengubah status perusahaan menjadi perusahaan publik (terbuka) dengan menawarkan 50.000.000 saham biasa kepada masyarakat dengan harga nominal Rp. 500,- per lembar sahamnya, disertai dengan penerbitan waran sejumlah 20.000.000 lembar yang dicatatkan pada Bursa Efek Jakarta tanggal 10 Januari 2001, sehingga jumlah saham beredar saat itu menjadi sebanyak 150.000.000 saham.

Modal Disetor Bank BNP bertambah pada bulan Januari 2004 sebagai akibat adanya exercise waran sebanyak 8.275.000 lembar menjadi saham biasa atas nama dengan nominal Rp. 500,- sehingga jumlah tersebut menambah jumlah saham beredar menjadi 158.275.000 saham.

Dengan tujuan untuk memperkuat struktur permodalan Bank BNP, maka pada bulan Juli 2006 dilakukan Penawaran Umum Terbatas I (PUT 1) kepada pemegang saham atas sejumlah 158.275.000 lembar saham dengan harga penawaran sebesar Rp. 550,- per saham, sehingga jumlah saham beredar yang telah dikeluarkan Bank BNP menjadi 316.550.000 saham.

Pada tanggal 17 Desember 2007, kepemilikan mayoritas saham Bank BNP telah beralih kepada ACOM CO., LTD. Japan (ACOM) dan The Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ, Ltd. (BTMU) melalui akuisisi saham sebanyak 75,41% saham Bank BNP, dimana ACOM menguasai 55,41% dan BTMU menguasai 20% dari seluruh saham yang telah dikeluarkan Bank BNP, sehingga dengan demikian keduanya menjadi Pemegang Saham Pengendali Bank BNP. Selanjutnya per 31 Desember 2011, komposisi saham ini menjadi 75,51% saham dimana ACOM menguasai 60,31% dan BTMU menguasai 15.20% dari seluruh saham. Hingga saat ini jumlah saham yang telah dikeluarkan Perseroan seluruhnya berjumlah 416.513.158 lembar dengan nominal Rp. 208. 256.579.000,-

4.1.1.12 Sejarah Bank Permata

PermataBank dibentuk sebagai hasil merger dari 5 bank di bawah pengawasan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), yakni PT Bank Bali Tbk, PT Bank Universal Tbk, PT Bank Prima Express, PT Bank Artamedia, dan PT Bank Patriot pada tahun 2002. Di tahun 2004, Standard Chartered Bank dan PT Astra International Tbk mengambil alih PermataBank dan memulai proses transformasi secara besar-besaran didalam organisasi. Selanjutnya, sebagai wujud komitmennya terhadap PermataBank, kepemilikan gabungan pemegang saham utama ini meningkat menjadi 89,01% pada tahun 2006.

Kombinasi unik dari kedua pemegang saham strategis merupakan salah satu kekuatan utama PermataBank. PT Astra International Tbk merupakan perusahaan Indonesia yang besar dan memiliki pengalaman kuat di pasar domestik. Standard

Chartered Bank dengan keahlian dan pengalaman global terkemuka yang dimilikinya menjadikan PermataBank berada dalam posisi yang unik.

Dan saat ini PermataBank telah berkembang menjadi sebuah bank swasta utama yang menawarkan produk dan jasa inovatif serta komprehensif terutama disisi delivery channel-nya termasuk Internet Banking dan Mobile Banking. PermataBank memiliki aspirasi untuk menjadi penyedia jasa keuangan terkemuka di Indonesia, dengan fokus di segmen Konsumer dan Komersial. Melayani sekitar 2 juta nasabah di 57 kota di Indonesia, PermataBank memiliki 289 cabang (termaksuk 12 cabang Syariah) dan 776 ATM dengan akses tambahan di lebih dari 40.000 ATM (VisaPlus, Visa Electron, MC, Alto, ATM Bersama dan ATM Prima)

Pengakuan terkini atas pencapaian PermataBank adalah Penghargaan dari Bisnis Indonesia Award sebagai bank nasional terbaik tahun 2010, The Most Profitable and The Most Efficient Syariah Unit 2009 dalam The Islamic Award Nite 2010, The Asian Banker Sebagai Bank dengan Cash Management Terbaik di Indonesia 2010, The Most Prestigious Carre' dalam CCSL's Annual Call Center Award 2010 selama lima kali berturut-turut, peringkat pertama Annual Report Award 2008 untuk kategori listed private bank dan juara umum “Annual Report Award 2008 untuk seluruh kategori, peringkat pertama terbaik e-Company Award 2008 untuk seluruh kategori, Corporate Governance Award untuk kategori Best Equitable Treatment of Shareholders dari Business Review, Asosiasi Emiten Indonesia dan IICD, posisi kedua The Best CEO in Asia Best Managed Companies dan delapan besar The Best Corporate Governance in Asia Best Managed Companies dari Finance Asia Magazine, Banking Service Excellence Awards 2009

(10 konvensional dan 7 syariah) dari MRI & InfoBank, Penghargaan dari MURI untuk Nabung Serentak di 12 kota bagi pelajar, The Prestigious Service Quality Diamond Award 2009 dari Carre - Center for Service Satisfaction & Loyalty (CCSL) & Marketing Magazine dan Banking Efficiency Award 2009 dari Bisnis Indonesia.

4.1.1.13 Sejarah Bank Swadesi

PT Bank of India Indonesia Tbk (dahulu PT Bank Swadesi Tbk) (BSWD) didirikan 28 September 1968 dengan nama PT Bank Pasar Swadesi. Kantor pusat BSWD di Jalan H. Samanhudi No. 37, Jakarta Pusat. Saat ini BSWD mempunyai 8 kantor cabang, 5 kantor cabang pembantu dan 5 kantor kas.

Berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan BSWD adalah menjalankan dan mengusahakan kegiatan yang berhubungan dengan perbankan.

Pada tanggal 12 April 2002, BSWD memperoleh pernyataan efektif dari BAPEPAM-LK untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham (IPO) Perusahaan kepada masyarakat sebanyak 60.000.000 dengan nilai nominal Rp200,- per saham dengan harga penawaran Rp250,- per saham. Saham-saham tersebut dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tanggal 01 Mei 2002.

4.1.1.14 Sejarah Bank Victoria Internasional

PT Bank Victoria International Tbk (BVIC) didirikan 28 Oktober 1992 dan mulai beroperaso secara komersial pada tanggal 05 Oktober 1994. Kantor pusat BVIC berlokasi di Gedung Bank Panin Senayan Lantai Dasar Jl.Jend Sudirman No.1 Jakarta 10270-Indonesia.

Berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan BVIC adalah menjalankan kegiatan usaha di bidang perbankan.

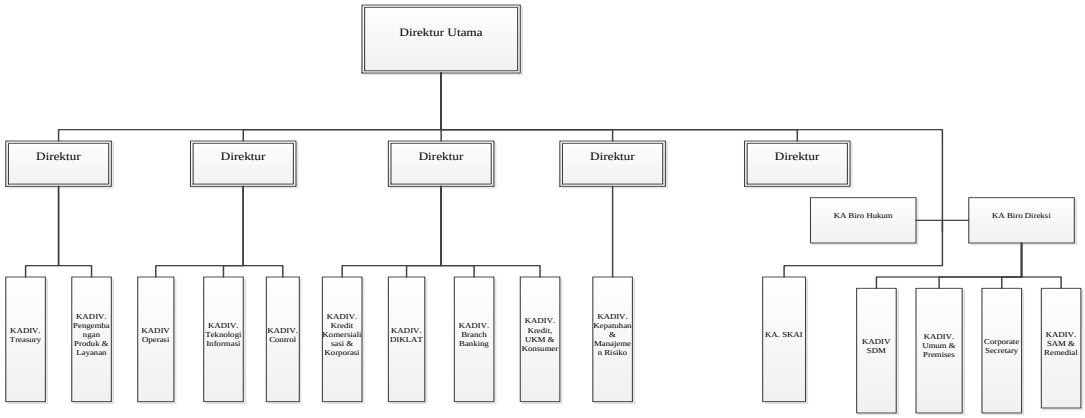
Pada tanggal 04 Juni 1999, BVIC memperoleh pernyataan efektif dari Menteri Keuangan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham BVIC kepada masyarakat sebanyak 250.000.000 dengan nilai nominal Rp100,- per saham dengan harga penawaran Rp100,- per saham dan disertai 80.000.000 Waran seri I. Saham dan Waran Seri I tersebut dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tanggal 03 Juni 1999.

4.1.2 Struktur Organisasi Perusahaan

Struktur organisasi dalam suatu perusahaan dengan perusahaan lainnya pasti berbeda yang membedakannya apakah perusahaan tersebut bertujuan *profit oriented* atau tidak dan jenis usaha dari perusahaan tersebut. Struktur organisasi dalam suatu perusahaan sangat penting peranannya karena dengan adanya struktur organisasi maka pembagian tugas atau *job description* dalam suatu jabatan jelas apa yang harus dilakukannya selain itu struktur organisasi pun berguna untuk pengawasan intern perusahaan.

Berikut ini merupakan struktur organisasi dari 14 bank umum swasta yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang dijadikan sampel penelitian:

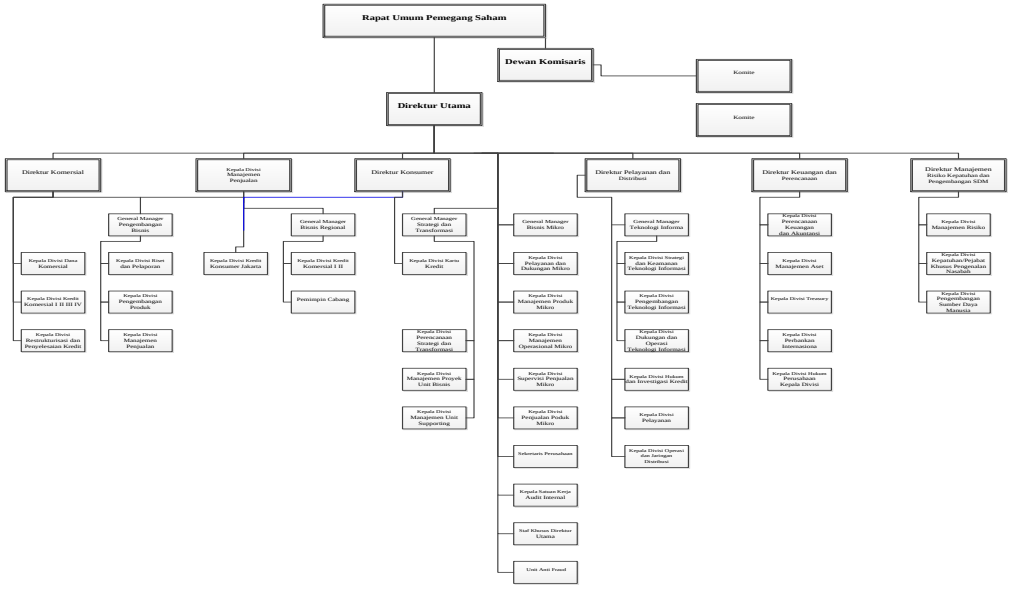
4.1.2.1 Struktur Organisasi Bank Artha Graha



Sumber: Laporan Tahunan Bank Artha Graha Tahun 2012

Gambar 4.1
Struktur Organisasi Bank Artha Graha

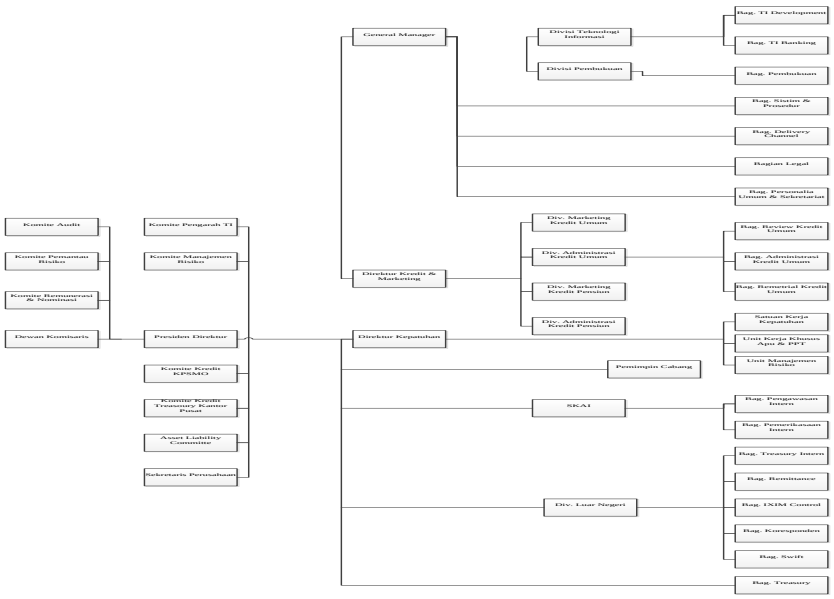
4.1.2.2 Struktur Organisasi Bank Bukopin



Sumber: Laporan Tahunan Bank Bukopin 2012

Gambar 4.2
Struktur Organisasi Bank Bukopin

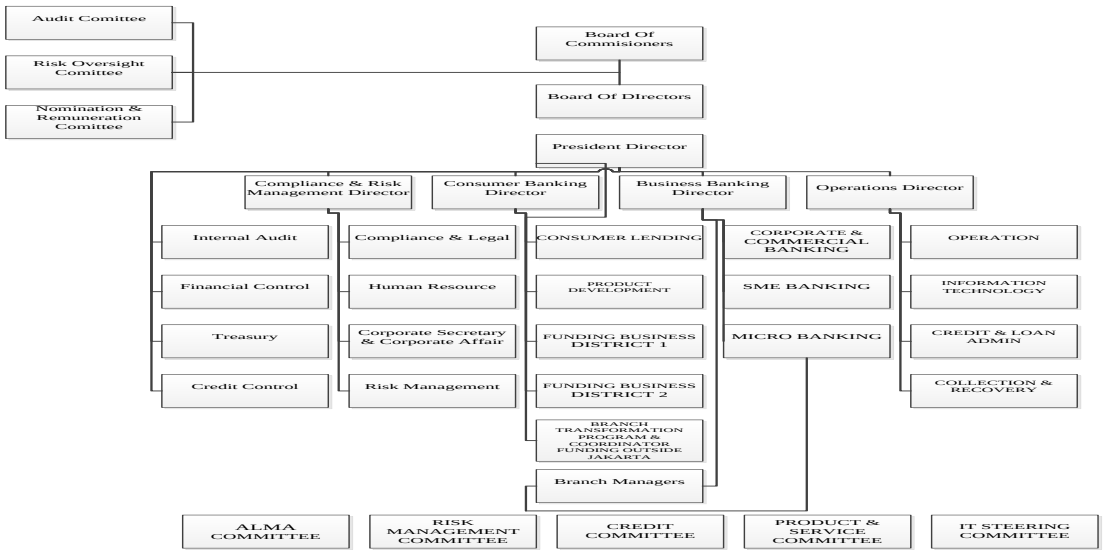
4.1.2.3 Struktur Organisasi Bank Bumi Arta



Sumber: Laporan Tahunan Bank Bumi Arta 2012

Gambar 4.3
Struktur Organisasi Bank Bumi Arta

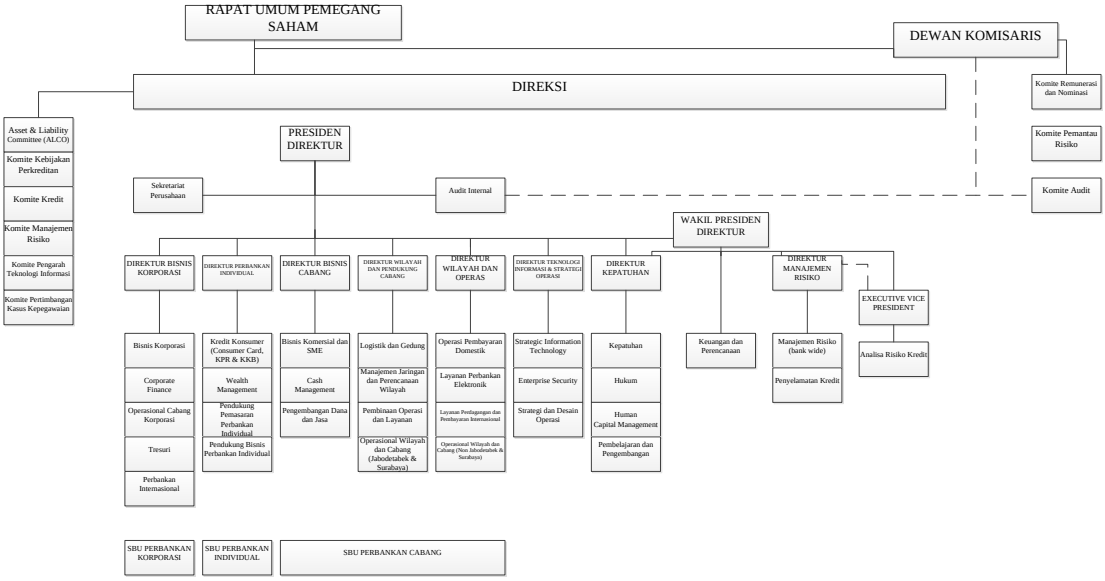
4.1.2.4 Struktur Organisasi Bank Bumiputera



Sumber: Laporan Tahunan Bank Bumiputera 2012

Gambar 4.4
Struktur Organisasi Bank Bumiputera

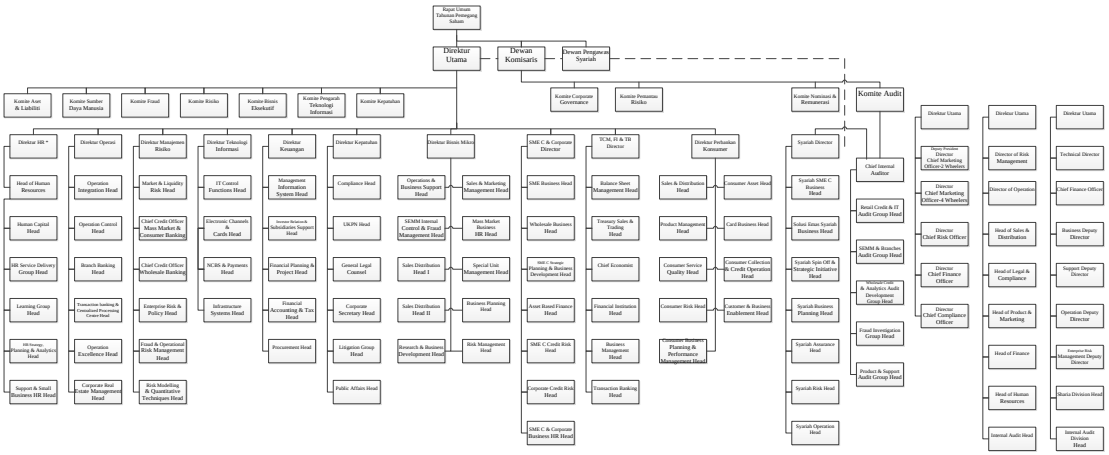
4.1.2.5 Struktur Organisasi Bank BCA



Sumber: Laporan Tahunan Bank BCA 2012

Gambar 4.5
Struktur Organisasi Bank BCA

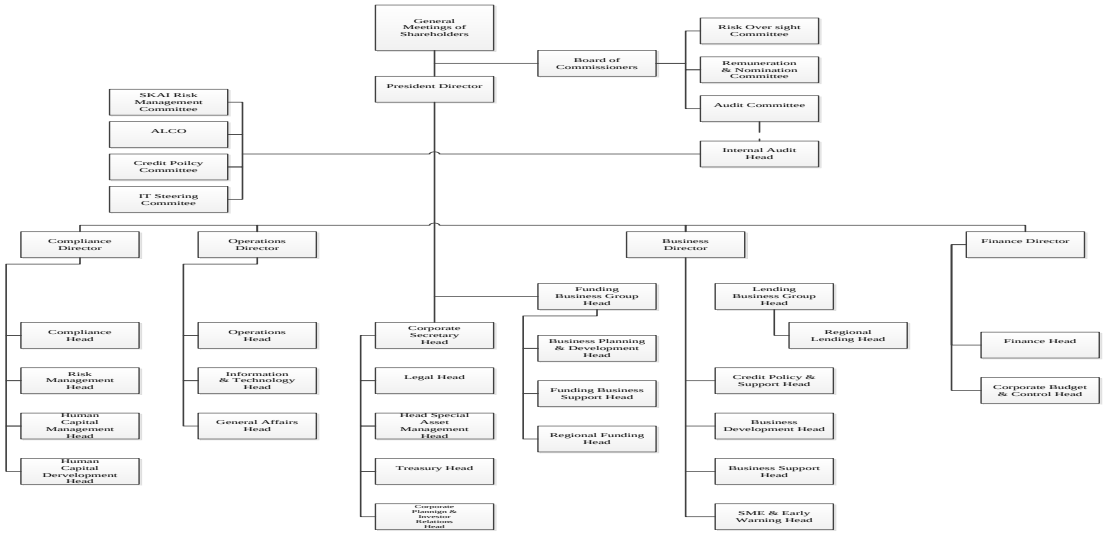
4.1.2.6 Struktur Organisasi Bank Danamon



Sumber: Laporan Tahunan Bank Danamon 2012

Gambar 4.6
Struktur Organisasi Bank Danamon

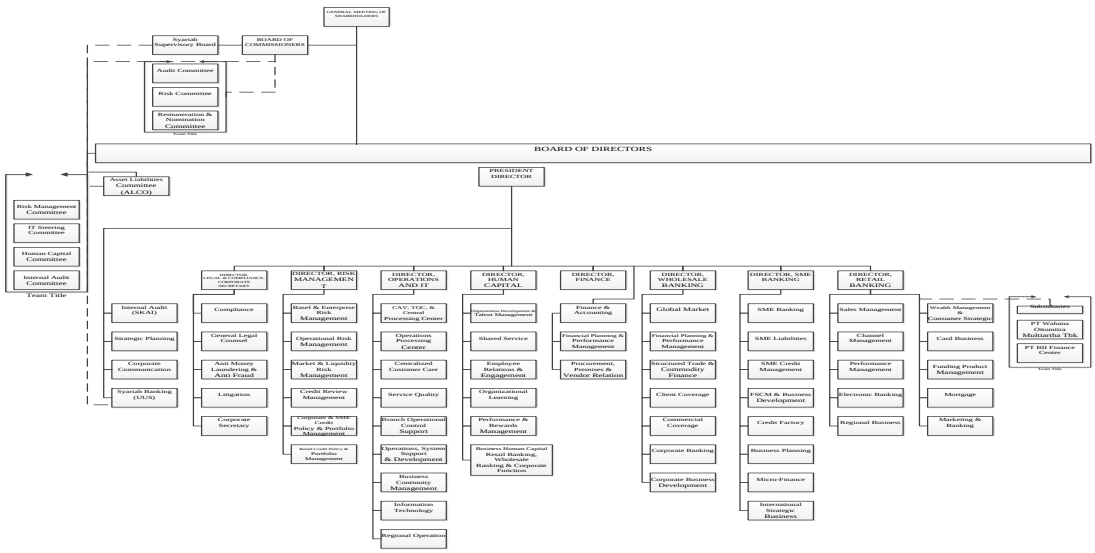
4.1.2.7 Struktur Organisasi Bank Eksekutif Internasional



Sumber: Laporan Tahunan Bank Eksekutif Internasional 2012

Gambar 4.7
Struktur Organisasi Bank Eksekutif Internasional

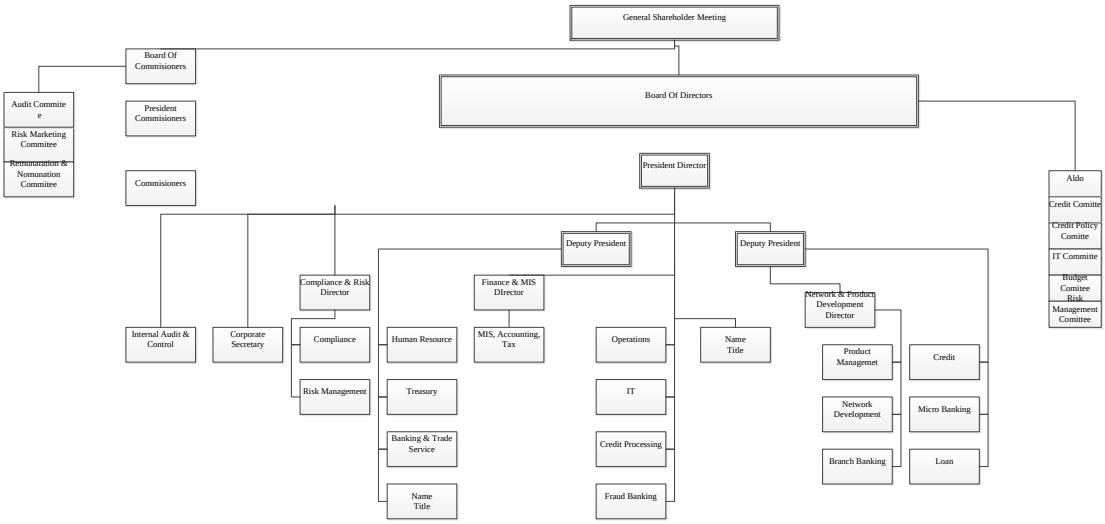
4.1.2.8 Struktur Organisasi Bank BII



Sumber: Laporan Tahunan Bank BII 2012

Gambar 4.8
Struktur Organisasi Bank BII

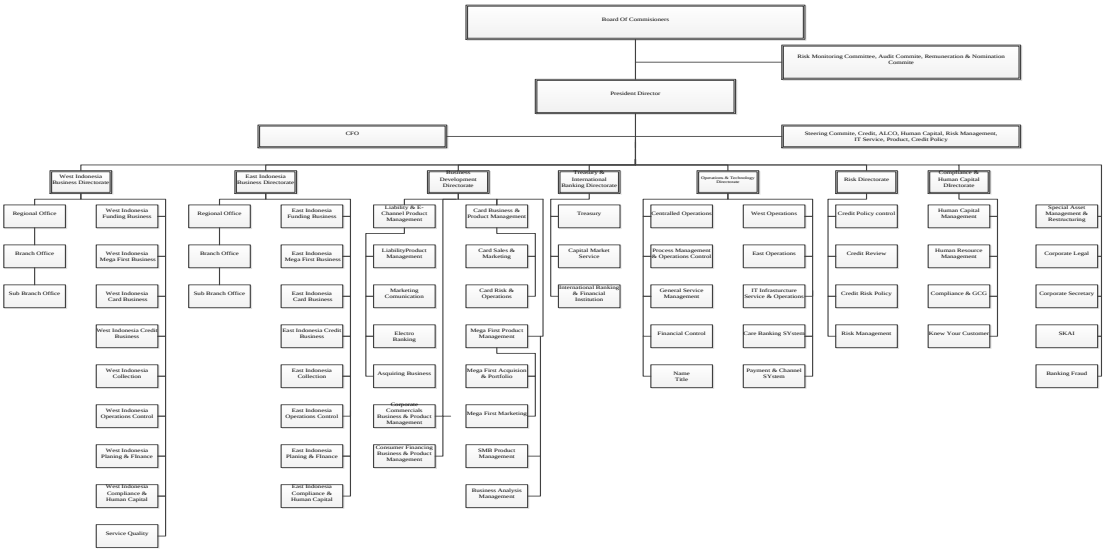
4.1.2.9 Struktur Organisasi Bank Mayapada



Sumber: Laporan Tahunan Bank Mayapada 2012

Gambar 4.9
Struktur Organisasi Bank Mayapada

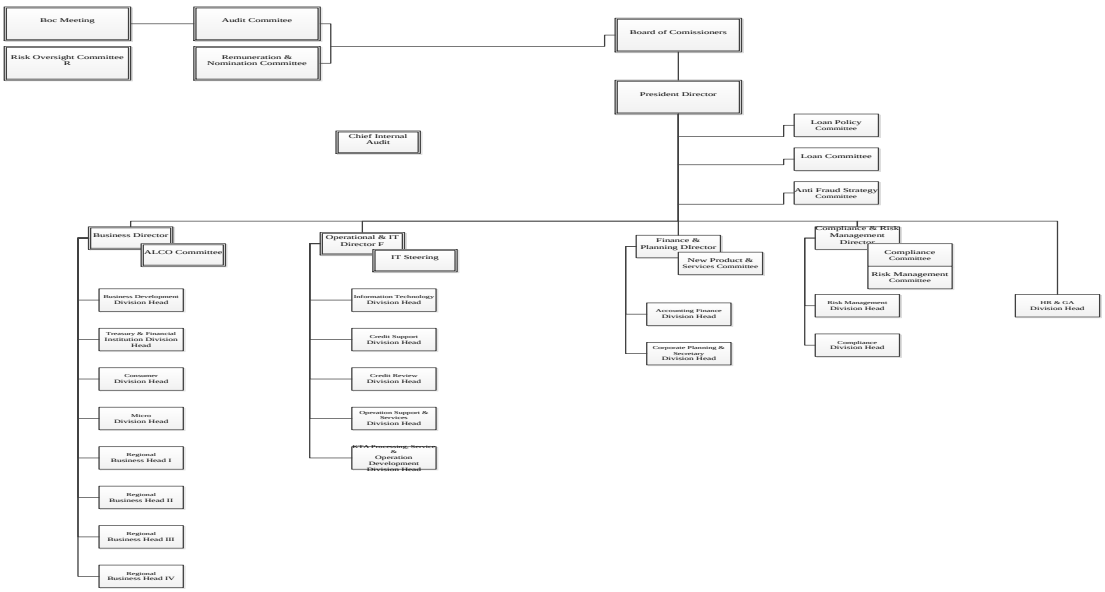
4.1.2.10 Struktur Organisasi Bank Mega



Sumber: Laporan Tahunan Bank Mega 2012

Gambar 4.10
Struktur Organisasi Bank Mega

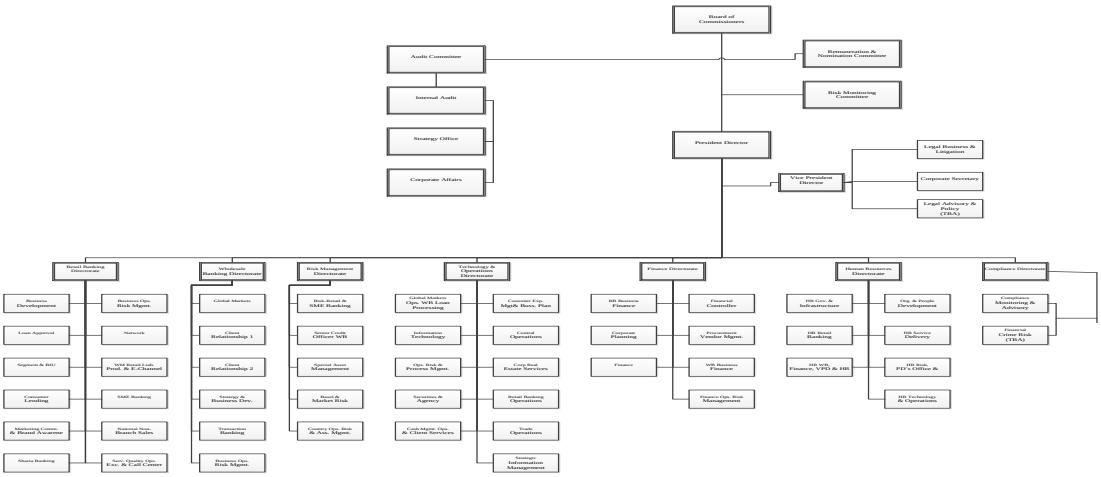
4.1.2.11 Struktur Organisasi Bank Nusantara Parahyangan



Sumber: Laporan Tahunan Bank Nusantara Parahyangan 2012

Gambar 4.11
Struktur Organisasi Bank Nusantara Parahyangan

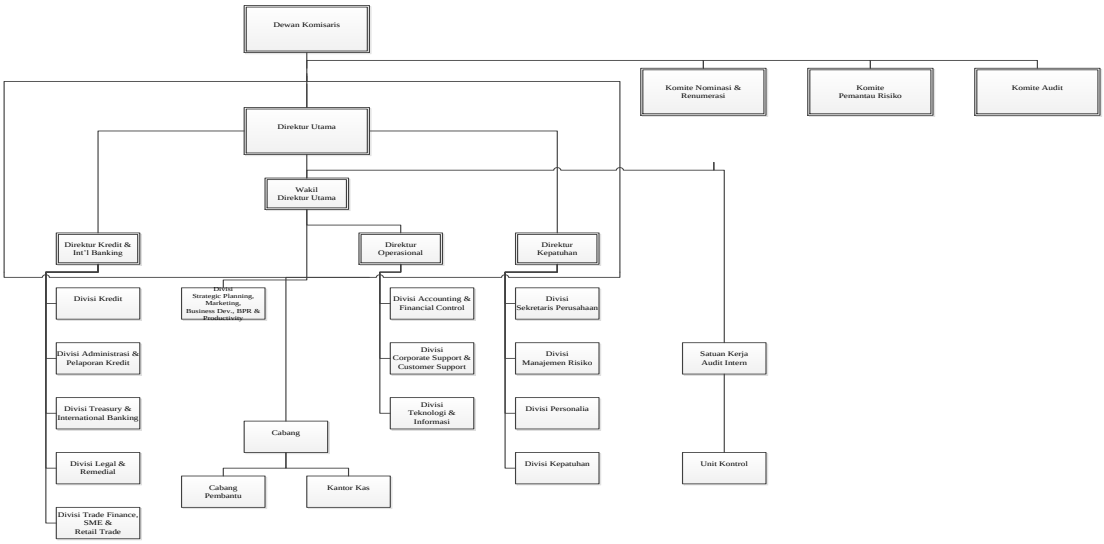
4.1.2.12 Struktur Organisasi Bank Permata



Sumber: Laporan Tahunan Bank Permata 2012

Gambar 4.12
Struktur Organisasi Bank Permata

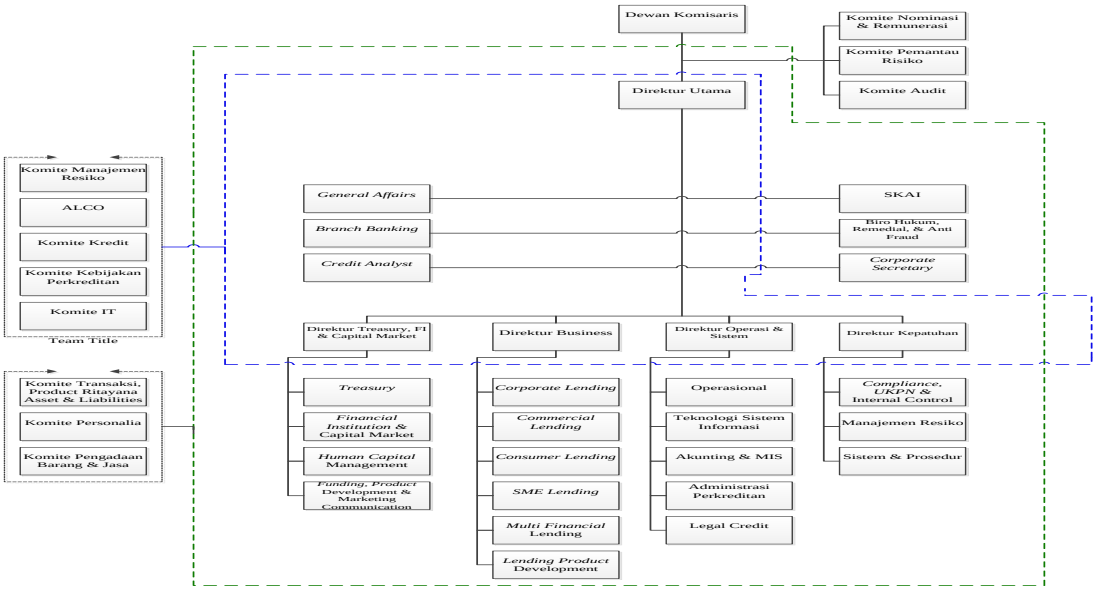
4.1.2.13 Struktur Organisasi Bank Swadesi



Sumber: Laporan Tahunan Bank Swadesi 2012

Gambar 4.13
Struktur Organisasi Bank Swadesi

4.1.2.14 Struktur Organisasi Bank Victoria



Sumber: Laporan Tahunan Bank Victoria 2012

Gambar 4.14
Struktur Organisasi Bank Victoria

4.1.3 *Job Description*

Setiap jabatan dalam struktur organisasi suatu perusahaan memiliki tugas dan wewenang yang berbeda-bede. Berikut ini merupakan uraian tugas dari masing-masing jabatan:

1. Dewan Komisaris

   Dewan Komisaris adalah organ perusahaan yang bertugas dan bertanggung jawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi serta memastikan bahwa perusahaan melaksanakan GCG pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.

   Dewan Komisaris memiliki tugas sebagai berikut:

   - Memastikan terus terselenggaranya pelaksanaan prinsip-prinsip GCG dalam setiap jenjang organisasi dibantu oleh unit-unit kerja terkait,
   - Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, pengawasan atas kebijaksanaan Direksi serta pemberian nasehat kepada Direksi
   - Memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja audit intern Bank, auditor eksternal, hasil pengawasan Bank Indonesia dan/atau hasil pengawasan otoritas lainya.

2. Direksi

   Direksi adalah organ perusahaan yang bertanggungjawab penuh atas pengurusan perusahaan untuk kepentingan dan tujuan perusahaan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

3. Komite Audit

   Komite Audit bertugas membantu Dewan Komisaris yang mengacu pada Peraturan Bank Indonesia. Berikut ini merupakan tugas dan tanggung jawab komite audit:

   - Melakukan evaluasi atas pelaksanaan audit intern dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan dan melakukan koordinasi dengan Kantor Akuntan Publik dalam rangka efektivitas pelaksanaan audit ekstern.
   - Memberikan rekomendasi mengenai penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik kepada Dewan Komisaris.

4. Komite Remunerasi dan Nominasi

   Komite Remunerasi dan Nominasi dibentuk untuk membantu Dewan Komisaris dalam menjalankan tugas pengawasan terhadap Perseroan, khususnya untuk memastikan bahwa sistem/kebijakan remunerasi dan nominasi Perseroan telah disusun dan dilaksanakan berdasarkan asas keadilan dan transparansi serta patuh kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Komite Pemantau Risiko

   Komite Pemantau Risiko bertugas:

   - Melakukan evaluasi terhadap kebijakan manajemen risiko
   - Melakukan evaluasi atas kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut.
   - Melakukan *monitoring* dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko, untuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.

6. Komite Asset And Liability (ALCO)

   Asset Liability Committee (ALCO) membantu Direksi dalam mengelola secara *prudent* aktiva dan pasiva Bank/*Asset Liabilities Management* (ALMA) dengan mempertimbangkan aspirasi *stakeholder* Bank

7. Komite Kebijakan Perkreditan

   Komite Kebijakan Perkreditan bertugas:

   - Memutuskan seluruh Kebijakan Perkreditan yang berlaku di Bank
   - Melakukan kajian berkala atas seluruh kebijakan perkreditan dan melakukan revisi apabila diperlukan
   - Menetapkan target market kredit berikut sektor-sektor yang harus dihindari
   - Menetapkan metode dan batasan pengukuran risiko kredit

8. Komite Manajemen Risiko

Tugas Komite Manajemen Risiko adalah sebagai berikut:

- Penyusunan Kebijakan Manajemen Risiko serta perubahannya, termasuk strategi manajemen risiko, tingkat risiko yang diambil dan toleransi risiko, kerangka manajemen risiko serta rencana kontinjensi untuk mengantisipasi terjadinya kondisi tidak normal,
- Penyempurnaan proses Manajemen Risiko secara berkala maupun bersifat insidentil sebagai akibat dari suatu perubahan kondisi eksternal dan internal Bank yang mempengaruhi kecukupan permodalan, profil risiko Bank, dan tidak efektifnya penerapan Manajemen Risiko berdasarkan hasil evaluasi,
- Penerapan kebijakan dan/atau keputusan bisnis yang menyimpang dari prosedur normal, seperti pelampauan ekspansi usaha yang signifikan dibandingkan dengan rencana bisnis Bank yang telah ditetapkan sebelumnya atau pengambilan posisi/eksposur Risiko yang melampaui limit yang telah ditetapkan,
- Mengevaluasi dan menyetujui penetapan limit risiko yang diajukan setiap bidang risiko (*risk taking unit*),

9. Komite Teknologi Informasi

   Tugas Komite Teknologi Informasi (KTI) :

   - Merumuskan dan memutuskan kebijakan jangka panjang dan jangka pendek dalam hal perencanaan dan penerapan teknologi sistem informasi yang akan diterapkan di Bank.
   - Melakukan evaluasi & menetapkan kebijakan, penyesuaian maupun penyempurnaan terhadap sistem informasi yang diterapkan,
   - Melakukan analisa terhadap perkembangan dan perubahan teknologi sistem informasi terutama di bidang perbankan.
   - Memutuskan prioritas proyek teknologi sistem informasi yang sedang atau akan dilaksanakan berdasarkan tingkat kepentingan bisnis.

10. Komite Hukum

    Biro Hukum mempunyai tugas melaksanakan penyusunan peraturan dan produk hukum, pemberian pertimbangan dan nasehat hukum, pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi bantuan hukum, pelaksanaan pengkajian dan pengembangan produk hukum, pelaksanaan pembinaan kesadaran hukum, pengelolaan, pengadministrasian data dan informasi, peraturan perundangan dan produk hukum.

11. Komite SDM

Tugas Komite Sumber Daya Manusia :

- Mendiskusikan dan menyusun struktur organisasi termasuk penetapan posisi/jabatan dalam organisasi,
- Memutuskan dan mendiskusikan kebijakan-kebijakan remunerasi yang diberikan kepada pegawai,
- Memutuskan untuk menerima dan menolak calon pejabat Bank untuk jabatan Pemimpin Divisi/Wilayah/Cabang/Capem/Kantor Kas dan Pemimpin Bagian serta memutuskan proses mutasi dan promosi untuk jabatan tersebut,
- Menetapkan penghargaan/sanksi dan bentuk ataupun jumlah penghargaan/ sanksi bagi pegawai,
- Menentukan dan menetapkan program pelatihan dan pengembangan SDM, termasuk didalamnya persetujuan pihak luar dalam penyelenggaraannya.

12. Komite Good Corporate Governance

Tugas dari Komite GCG adalah sebagai berikut:

- Menetapkan strategi penerapan GCG pada seluruh jajaran Bank dan melaksanakan evaluasi penerapannya.
- Melakukan pembahasan dan menyetujui kebijakan yang dibuat oleh Direksi dalam hal pelaksanaan GCG.

- Melakukan pembahasan terhadap permasalahan yang ada yang akan mempengaruhi penilaian GCG dan memberikan rekomendasi tindak lanjut yang harus dilakukan agar permasalah tersebut dapat diatasi.

13. Dewan Pengawas Syariah

Dewan Pengawas Syariah Bertugas:

- Menilai dan memastikan pemenuhan Prinsip Syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan Bank; sesuai dengan masukan yang telah dilaksanakan oleh unit kerja terkait.
- Memberi opini syariah proses pengembangan produk baru Bank agar sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia

4.1.4 Aktivitas Perusahaan

Aktivitas perusahaan dari 14 Bank Umum Swasta yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan dijadikan sebagai sampel penelitian hampir semuanya sama yaitu, menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat (nasabah).

4.2 Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif digunakan untuk mengetahui perkembangan profitabilitas, likuiditas dan kebijakan dividen pada Bank Umum Swasta yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2006-2011.

4.2.1 Perkembangan Profitabilitas Pada Bank Umum Swasta Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia

Profitablitas merupakan ukuran sebuah bank dalam menghasilkan keuntungan, rasio profitabilitas dapat pula digunakan untuk mengukur tingkat kesehatan bank. Profit yang dihasilkan oleh bank biasanya dihasilkan dari bunga atas simpanan masyarakat yang menyimpan uangnya dalam bentuk tabungan maupun deposito.

Dibawah ini adalah tabel dan grafik dari perkembangan profitabilitas pada Bank Umum Swasta yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2006-2011 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1
Perkembangan Profitabilitas Pada Bank Umum Swasta Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2006-2011

Profitabilitas (%)							
No	Nama Bank	Tahun					
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
1	Bank Artha Graha	5.59	2.39	2.38	4.35	7.93	8.70
2	Bank Bukopin	18.90	19.27	17.05	14.28	17.06	16.73
3	Bank Bumiarta	7.50	5.61	7.02	6.80	6.21	8.95
4	Bank Bumiputera	1.53	3.85	0.38	0.93	1.71	-15.30
5	Bank BCA	23.48	21.96	24.81	24.43	24.86	26.14
6	Bank Danamon	14.04	19.54	14.46	9.68	10.27	11.56
7	Bank Eksekutif Internasional	-11.80	0.61	-36.31	288.84	-34.55	-31.79

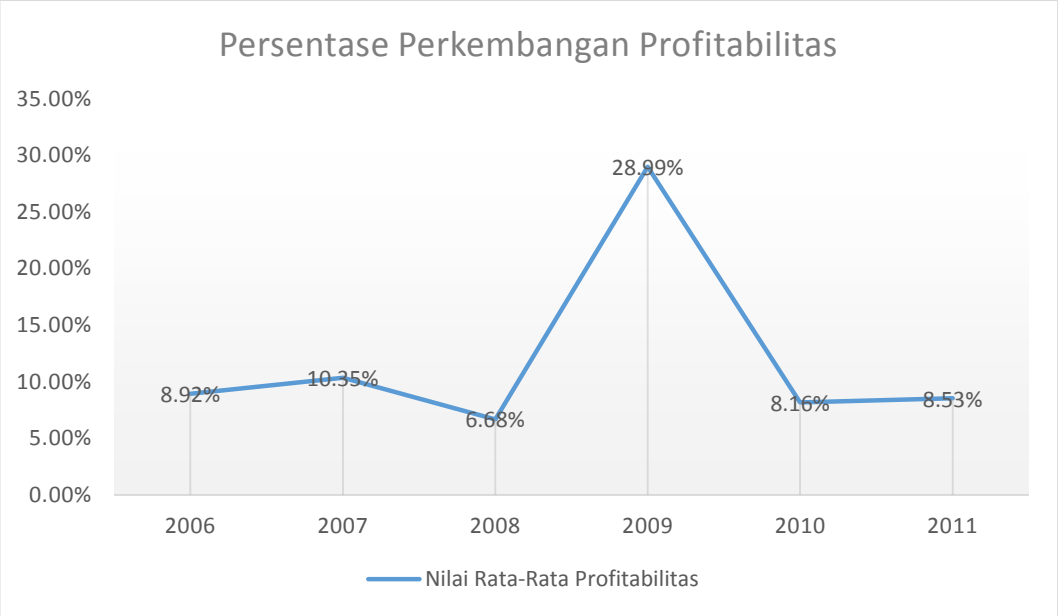
Profitabilitas (%)							
No	Nama Bank	Tahun					
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
8	Bank Internasional Indonesia	12.06	7.58	9.52	-0.78	6.38	8.44
9	Bank Mayapada	9.75	4.33	4.31	4.14	5.19	10.30
10	Bank Mega	7.84	17.72	17.48	15.79	22.03	22.01
11	Bank Nusantara Parahyangan	10.86	10.22	8.34	7.96	9.21	11.69
12	Bank Permata	8.28	12.79	10.55	9.93	12.59	12.66
13	Bank Swadesi	7.12	6.81	6.80	12.22	11.01	13.78
14	Bank Victoria	9.76	12.28	6.68	7.35	14.28	15.46
Rata-rata		8.92	10.35	6.68	28.99	8.16	8.53
Perkembangan		0	1.43	(3.67)	22.31	(20.83)	0.37

Sumber: Laporan Keuangan Sektor Perbankan (Data Diolah)

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa perkembangan profitabilitas pada bank umum swasta mengalami fluktuasi. Nilai rata-rata profitabilitas tertinggi terjadi pada tahun 2009 yaitu sebesar 28.99%, adapun perusahaan yang memiliki nilai profitabilitas tertinggi adalah Bank Eksekutif Internasional dengan nilai profitabilitas sebesar 288,84%, pada tahun 2009 sebenarnya Bank Eksekutif Internasional mengamalami kerugian, dan modal sendiri yang dimiliki oleh Bank Eksekutif Internasional mengalami defisit akan tetapi karena tingkat laba(rugi) yang lebih besar dibandingkan dengan modal sendiri yang mengakibatkan Bank Eksekutif Internasional memiliki nilai profitabilitas yang tinggi dibandingkan dengan sampel penelitian lainnya. Sedangkan nilai rata-rata profitabilitas terendah terjadi pada tahun 2008, adapun perusahaan yang memiliki nilai profitabilitas terendah adalah Bank Eksekutif Internasional dengan nilai profitabilitas sebesar -36.31% hal ini disebabkan oleh Bank Eksekutif Internasional mengalami kerugian dalam menjalankan kegiatan

usahanya sehingga mengakibatkan nilai profitabilitas Bank Eksekutif Internasional memiliki nilai terendah dibandingkan dengan sampel penelitian lainnya.

Sedangkan untuk lebih mempermudah membacanya, maka penulis menuangkan tabel tersebut ke dalam bentuk grafik seperti di bawah ini:



Gambar 4.15
Grafik Perkembangan Profitabilitas Pada Bank Umum Swasta Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2006-2011

Berdasarkan grafik yang ditelah disajikan oleh penulis diatas maka dapat diketahui perkembangan rasio profitabilitas pada Bank Umum Swasta yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2006-2011 mengalami fluktuatif. perkembangan positif terbesar selama periode penelitian terjadi pada tahun 2008 menuju tahun 2009 yaitu sebesar 22.31% peningkatan rasio profitabilitas ini diakibatkan oleh mayoritas sampel penelitian mengalami peningkatan laba bersih yang diterima, meningkatnya labar bersih ini diakibatkan oleh meningkatnya pendapatan bunga dan komisi, keuntungan transaksi mata uang asing dan

keuntungan dari kegiatan operasional lainnya. Sedangkan perkembangan negatif terbesar terjadi pada tahun 2009 menuju tahun 2010 sebesar (20.83%) hal ini lebih diakibatkan oleh nilai profitabilitas Bank Eksekutif Internasional pada tahun 2009 memiliki nilai yang tinggi sebesar yaitu 288.84% karena nilai profitabilitas bank umum swasta yang dijadikan sampel penelitian pada tahun 2010 cenderung mengalami kenaikan.

4.2.2 Perkembangan Likuiditas Pada Bank Umum Swasta Yang Terdaftar Di Burs Efek Indonesia

Likuiditas merupakan kemampuan bank dalam membayar kewajiban jangka pendeknya tepat pada waktunya. Baik buruknya tingkat likuiditas yang dimiliki suatu bank dapat dinilai dari 2 sudut pandang yang berbeda, menurut para nasabah semakin besar tingkat rasio likuiditas yang dimiliki oleh bank tentunya semakin baik, karena uang yang ditabung di bank yang bersangkutan akan aman apabila suatu saat nanti harus dicairkan, sedangkan menurut sudut pandang para kreditur ataupun para pemegang saham, semakin besar tingkat likuiditas yang dimiliki oleh bank maka tidak baik untuk perusahaan karena terlalu banyak uang yang menganggur di kas bank, yang tentunya lebih baik uang tersebut digunakan untuk operasional bank yang lainnya. Hal ini tentu saja berbanding terbalik karena adanya perbedaan kepentingan diantara nasabah dan para pemegang saham.

Dibawah ini merupakan tabel dan grafik dari perkembangan likuiditas pada Bank Umum Swasta yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2006-2011 sebagai berikut:

Tabel 4.2
Perkembangan Likuiditas Pada Bank Umum Swasta Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2006-2011

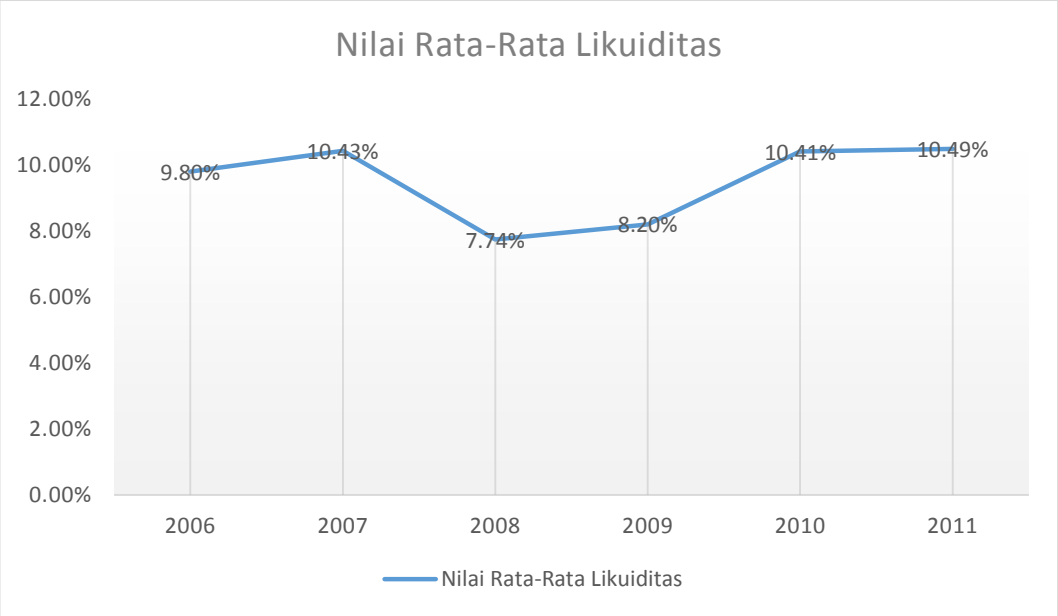
Likuiditas (%)							
No	Nama Bank	Tahun					
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
1	Bank Artha Graha	8.66	9.05	6.83	6.77	8.06	9.03
2	Bank Bukopin	9.55	13.36	6.43	6.83	8.27	8.51
3	Bank Bumiarta	13.21	11.92	9.10	7.62	10.74	10.73
4	Bank Bumiputera	10.47	10.43	6.97	8.29	8.45	8.35
5	Bank BCA	15.34	14.81	9.51	8.20	10.71	12.82
6	Bank Danamon	7.27	7.50	8.36	7.87	8.52	9.09
7	Bank Eksekutif Internasional	9.99	8.55	6.68	6.78	28.84	10.25
8	Bank Internasional Indonesia	9.88	10.40	9.88	15.01	8.49	12.61
9	Bank Mayapada	7.62	8.04	6.53	5.92	8.83	8.95
10	Bank Mega	10.07	11.21	8.02	8.48	10.05	9.61
11	Bank Nusantara Parahyangan	10.34	14.22	11.08	7.76	8.15	13.14
12	Bank Permata	9.09	10.04	7.09	7.17	9.42	10.54
13	Bank Swadesi	8.47	8.67	5.90	13.28	9.59	15.94
14	Bank Victoria	7.18	7.78	5.94	4.80	7.55	7.32
Rata-rata		9.80	10.43	7.74	8.20	10.41	10.49
Perkembangan		0	0.63	(2.69)	0.46	2.21	0.08

Sumber: Laporan Keuangan Sektor Perbankan (Data Diolah)

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa perkembangan likuiditas pada bank umum swasta mengalami fluktuasi. Nilai rata-rata likuiditas tertinggi terjadi pada tahun 2011 yaitu sebesar 10.49%, adapun perusahaan yang memiliki nilai likuiditas tertinggi adalah Bank Swadesi dengan nilai likuiditas sebesar 15.94% hal ini terjadi dikarenakan Bank Swadesi meningkatkan jumlah simpanannya dalam bentuk kas dan giro pada Bank Indonesia Sedangkan nilai rata-rata likuiditas terendah terjadi pada tahun 2008, adapun perusahaan yang memiliki nilai likuiditas terendah adalah Bank Swadesi dengan nilai likuiditas sebesar 5.90% hal ini disebabkan oleh Bank Swadesi mengurangi simpanannya dalam bentuk giro

pada Bank Indonesia akan tetapi jumlah pinjaman yang harus dibayar kepada nasabah meningkat.

Sedangkan untuk lebih mempermudah membacanya, maka penulis menuangkan tabel tersebut ke dalam bentuk grafik seperti di bawah ini:



Gambar 4.16
Grafik Perkembangan Likuiditas Pada Bank Umum Swasta Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2006-2011

Berdasarkan grafik yang ditelah disajikan oleh penulis diatas maka dapat diketahui perkembangan rasio likuiditas pada Bank Umum Swasta yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2006-2011 mengalami fluktuatif. Perkembangan positif terbesar terjadi pada tahun 2010 sebesar 2.21% kenaikan ini diakibatkan oleh adanya krisis global yang melanda pada tahun 2008, sehingga bank melakukan antisipasi agar tidak pailit dengan cara menaikkan simpanannya dalam bentuk kas dan giro pada Bank Indonesia sehingga apabila krisis global

kembali melanda maka bank sudah siap dengan dampak yang terjadi karena bank telah menyiapkan dana untuk membayar kewajibannya kepada nasabah. Sedangkan perkembangan negatif terbesar pada tahun 2008 sebesar (2.69%) penurunan nilai likuiditas ini dikarenakan jumlah pinjaman yang harus dibayar segera oleh 14 bank umum swasta yang dijadikan sampel penelitian cenderung meningkat belum lagi adanya krisis global yang melanda Amerika Serikat dan beberapa negara di Eropa berdampak terhadap menurunnya kepercayaan dari masyarakat sehingga meningkatkan jumlah pinjaman yang harus dibayar segera oleh bank.

4.2.3 Perkembangan Kebijakan Dividen Pada Bank Umum Swasta Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia

Kebijakan dividen merupakan keputusan apakah laba yang diterima oleh perusahaan akan dibagikan kepada para pemegang saham atau akan ditahan dalam bentuk laba ditahan untuk pembiayaan investasi di masa yang akan datang.

Data berupa tabel dan grafik dibawah ini merupakan perkembangan kebijakan dividen pada Bank Umum Swasta yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2006-2011 sebagai berikut:

Tabel 4.3
Perkembangan Kebijakan Dividen Pada Bank Umum Swasta Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2006-2011

Kebijakan Dividen (%)							
No	Nama Bank	Tahun					
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
1	Bank Artha Graha	0	0		0	0	0
2	Bank Bukopin	0.4	0.52	0	0.48	0.24	0.22
3	Bank Bumiarta	25.89	22.21	25.09	24.56	0	25.2
4	Bank Bumiputera	25.23	24.22	0	44.61	29.75	0
5	Bank BCA	0.33	0.18	0	0.25	0	0
6	Bank Danamon	0.49	0.49	0.3	0	0.35	0.29

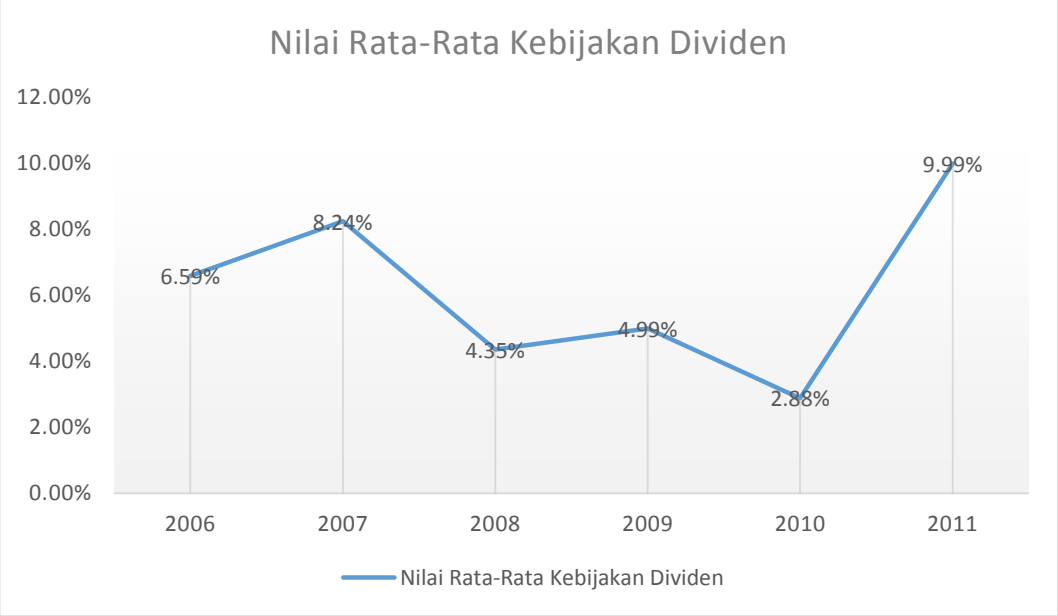
Kebijakan Dividen (%)							
No	Nama Bank	Tahun					
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
7	Bank Eksekutif Internasional	0	0	0	0	0	0
8	Bank Internasiona Indonesia	39.9	47.73	31.21	0	0	0
9	Bank Mayapada	0	0	0	0	0	46.4
10	Bank Mega	0	19.98	0	0	0	0
11	Bank Nusantara Parahyangan	0	0	0	0	10	10.39
12	Bank Permata	0	0	0	0	0	0
13	Bank Swadesi	0	0	0	0	0	57.29
14	Bank Victoria	0	0	0	0	0	0
Rata-rata		6.59	8.24	4.35	4.99	2.88	9.99
Perkembangan		0	1.65	(3.89)	0.64	(2.11)	7.11

Sumber: Laporan Keuangan Sektor Perbankan (Data Diolah)

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa perkembangan kebijakan dividen pada bank umum swasta mengalami fluktuasi. Nilai rata-rata kebijakan dividen tertinggi terjadi pada tahun 2011 yaitu sebesar 9.99%, adapun perusahaan yang memiliki nilai kebijakan dividen tertinggi adalah Bank Swadesi dengan nilai kebijakan dividen sebesar 57.29% hal ini dapat terjadi dikarenakan Bank Swadesi mendapatkan peningkatan dari laba yang diterima sehingga laba per lembar saham pun akan meningkat Sedangkan nilai rata-rata kebijakan dividen terendah terjadi pada tahun 2010, adapun perusahaan yang memiliki nilai kebijakan dividen terendah adalah 10 perusahaan selain Bank Bukopin, Bank Bumiputera, Bank Danamon dan Bank Nusantara Parahyangan ke-10 perusahaan ini memiliki nilai terendah kebijakan dividen dikarenakan tidak membagikan dividennya kepada para pemegang saham, hal ini dapat terjadi dikarenakan dalam RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) menghasilkan keputusan untuk tidak membagikan kebijakan dividen kepada para pemegang saham melainkan memilih untuk menggunakan

dana yang dimiliki perusahaan untuk melakukan investasi untuk masa depan bagi perusahaan tersebut.

Sedangkan untuk lebih mempermudah membacanya, maka penulis menuangkan tabel tersebut ke dalam bentuk grafik seperti di bawah ini:



Gambar 4.17
Grafik Perkembangan Kebijakan Dividen Pada Bank Umum Swasta Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2006-2011

Berdasarkan data diatas dapat dilihat perkembangan kebijakan dividen pada Bank Umum Swasta periode 2006-2011 mengalami fluktuatif. Perkembangan positif terbesar selama penelitian terjadi pada tahun 2011 sebesar 7.11% peningkatan kebijakan dividen pada tahun 2011 ini diakibatkan oleh kecenderungan perusahaan mendapatkan peningkatan laba bersih yang diperoleh perusahaan dengan demikian akan meningkatkan pula laba per lembar saham. Sedangkan perkembangan negatif terbesar selama penelitian terjadi pada tahun 2008 sebesar (3.89%) dikarenakan terjadinya krisis global yang melanda negara Amerika Serikat dan beberapa negara di Eropa mengakibatkan perusahaan lebih memilih

menggunakan dananya untuk memperkuat posisi perusahaan dengan cara melakukan investasi maupun ekspansi perusahaan daripada memberikan dananya kepada para pemegang saham dalam bentuk dividen.

4.3 Analisis Verifikatif

4.3.1 Analisis Korelasi

Tabel 4.4
Koefisien Korelasi
Profitabilitas (ROE), Likuiditas (Cash Ratio), dan Kebijakan Dividen (DPR)

Correlations

		ROE	CASHRATIO	DPR
ROE	Pearson Correlation	1	-.145	-.055
	Sig. (2-tailed)		.189	.622
	N	84	84	84
CASHRATIO	Pearson Correlation	-.145	1	.158
	Sig. (2-tailed)	.189		.152
	N	84	84	84
DPR	Pearson Correlation	-.055	.158	1
	Sig. (2-tailed)	.622	.152	
	N	84	84	84

Koefisien korelasi tersebut dapat diinpretasikan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil output dari pengolahan data menggunakan software SPSS V.15 *for windows* diperoleh nilai koefisien korelasi antara Profitabilitas (*ROE*) dengan Likuiditas (*Cash Ratio*) sebesar -0,145 artinya hubungan Profitabilitas (*ROE*) dengan Likuiditas *(Cash Ratio)* sangat rendah. Koefisien korelasi bertanda negatif menunjukkan Profitabilitas *(ROE)* dengan Likuiditas *(Cash Ratio)* adalah terbalik, artinya jika Profitabilitas *(ROE)* meningkat maka Likuiditas (*Cash Ratio*) akan menurun. Kesimpulannya adalah korelasi antara Profitabilitas (*ROE*) dengan Likuiditas *(Cash Ratio)* sangat rendah dan terbalik.

2. Berdasarkan hasil output dari pengolahan data menggunakan software SPSS V.15 *for windows* diperoleh nilai koefisien korelasi antara Profitabilitas *(ROE)* dengan Kebijakan Dividen *(DPR)* sebesar -0,055 artinya hubungan antara Profitabilitas *(ROE)* dengan Kebijakan Dividen *(DPR)* sangat rendah. Koefisien korelasi bertanda negatif menunjukkan hubungan Profitabilitas *(ROE*) dengan Kebijakan Dividen *(DPR)* adalah terbalik, artinya jika Profitabilitas *(ROE)* meningkat maka Kebijakan Dividen *(DPR*) akan menurun. Kesimpulannya adalah korelasi antara Profitabilitas *(ROE)* dengan Kebijakan Dividen *(DPR)* sangat rendah dan terbalik.
3. Berdasarkan hasil output dari pengolahan data menggunakan software SPSS V.15 *for windows* diperoleh nilai koefisien korelasi antara Likuiditas *(Cash Ratio*) dengan Kebijakan Dividen *(DPR)* sebesar 0,158 artinya hubungan antara Likuiditas *(Cash Ratio)* dengan Kebijakan Dividen *(DPR)* sangat rendah. Koefisien korelasi bertanda positif menunjukkan hubungan Likuiditas *(Cash Ratio)* dengan Kebijakan Dividen *(DPR*) adalah searah, artinya jika Likuiditas *(Cash Ratio)* meningkay maka Kebijakan Dividen *(DPR)* juga akan meningkat. Kesimpulannya adalah korelasi antara Likuiditas *(Cash Ratio*) dengan Kebijakan Dividen *(DPR)* sangat rendah dan searah.

4.3.2 Analisis Jalur

Selanjutnya untuk menguji pengaruh Profitabilitas dan Likuiditas terhadap Kebijakan Dividen secara individu ditempuh dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Menyusun matriks korelasi antar variabel sebab/independen, dalam penelitian ini yang jadi variabel sebab adalah Profitabilitas (X_1) dan Likuiditas (X_2)

		X_1	X_2
R =	**X_1**	1,000	-0.145
	X_2	-0,145	1,000

2. Mengitung invers dari matriks korelasi antara variabel adalah Profitabilitas (X_1) dan Likuiditas (X_2)

3. $\mathbf{R^{-1}} = \frac{\mathbf{1}}{(\mathbf{1x1}) - (\mathbf{-0.145x-0,145})} \begin{bmatrix} \mathbf{1} & \mathbf{0,145} \\ \mathbf{0,145} & \mathbf{1} \end{bmatrix}$

4. $\mathbf{R^{-1}} = \frac{\mathbf{1}}{\mathbf{0,979}} \begin{bmatrix} \mathbf{1} & \mathbf{0,145} \\ \mathbf{0,145} & \mathbf{1} \end{bmatrix}$

5. $\mathbf{R^{-1}} = \mathbf{1,021} \begin{bmatrix} \mathbf{1} & \mathbf{0,145} \\ \mathbf{0,145} & \mathbf{1} \end{bmatrix}$

		X_1	X_2
R^{-1} =	**X_1**	1,021 x 1	1,021 x 0,145
	X_2	1,021 x 0,145	1,021 x 1

Maka, invers dari matriks korelasi antara variable Profitabilitas (X_1) dengan Likuiditas (X_2) adalah:

		X_1	X_2
R^{-1} =	**X_1**	1,021	0.148
	X_2	0,148	1,021

6. Hitung koefisien korelasi antara variabel bebas (Profitabilitas dan Likuiditas) dengan variabel terikat (Kebijakan Dividen).

R =	rx_1y	-0,055
	rx_2y	0,158

7. Untuk memperoleh koefisien jalur, kalikan invers dari matriks korelasi antar variabel sebab terhadap matriks korelasi variabel sebab dengan variabel akibat

P_{YX1}	=	1,021	0,148	X	-0,055	=	-0,032
P_{YX2}		0,148	1,021		0,158		0,153

Jadi diperoleh koefisien jalur untuk variabel Profitabilitas terhadap Kebijakan Dividen sebesar -0,032 dan koefisien jalur variabel Likuiditas terhadap Kebijakan Dividen sebesar 0,153.

Berikut adalah nilai koefisien jalur hasil output dari software SPSS V.15 yang dapat dilihat di tabel *Coefficients*[a] dikolom *Standardized Coefficients.*

Tabel 4.5
Koefisien Jalur
Profitabilitas (ROA), Likuiditas (Cash Ratio) dan Kebijakan Dividen (DPR)
Coefficients(a)

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta	B	Std. Error
1	(Constant)	.109	4.806		.023	.982
	ROE	-.013	.046	-.032	-.292	.771
	CASHRATIO	.649	.470	.153	1.381	.171

a Dependent Variable: DPR

Berdasarkan hasil penghitungan diatas, dapat diketahui besarnya nilai koefisien jalur Profitabilitas (X_1) terhadap Kebijakan Dividen (Y) adalah -0,32 dan besarnya nilai koefisien jalur Likuiditas (X_2) terhadap Kebijakan Dividen (Y) adalah 0,153.

4.3.3 Analisis Koefisien Determinasi

Berikut adalah tabel koefisien determinasi secara parsial berdasarkan perhitungan menggunakan Software SPSS V.15:

Tabel 4.6
Koefisien Determinasi
Profitabilitas (ROE) dan Likuiditas (Cash Ratio) terhadap Kebijakan Dividen (DPR) Secara Parsial

	Standart Coefficients Beta	Zero Order
X_1	-.032	-.055
X_2	.153	.158

a Predictors: (Constant), ROE, CASHRATIO

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui besarnya pengaruh secara parsial antara variabel independen terhadap variabel dependen sebagai berikut:

X1= (0.032) X (0.055) = 0.00176

X2= 0.153 X 0.158 = 0.024174

4.4 Pengujian Hipotesis

4.4.1 Pengujian Hipotesis Secara Parsial

4.4.1.1 Pengujian Hipotesis Profitabilitas Terhadap Kebijakan Dividen Secara Parsial

Selanjutnya, untuk melihat lebih rinci pengaruh secara parsial dari variabel bebas terhadap variabel terikat, berikut disajikan uji hipotesis secara parsial menggunakan uji t.

Hipotesis penelitian yang diuji, akan dirumuskan menjadi hipotesis statistik sebagai berikut:

- Ho : $\rho yx_1 = 0$;
- Ha : $\rho yx_1 \neq 0$;

Hipotesis dalam bentuk kalimat:

Ho : Profitabilitas berpengaruh secara tidak signifikan terhadap Kebijakan Dividen

Ha : Profitabilitas berpengaruh secara Signifikan terhadap Kebijakan Dividen

Uji secara individual ditunjukan oleh Tabel *(Coefficients).* Berdasarkan hasil output SPSS V.15, diketahui nilai t_{tabel} adalah sebagai berikut:

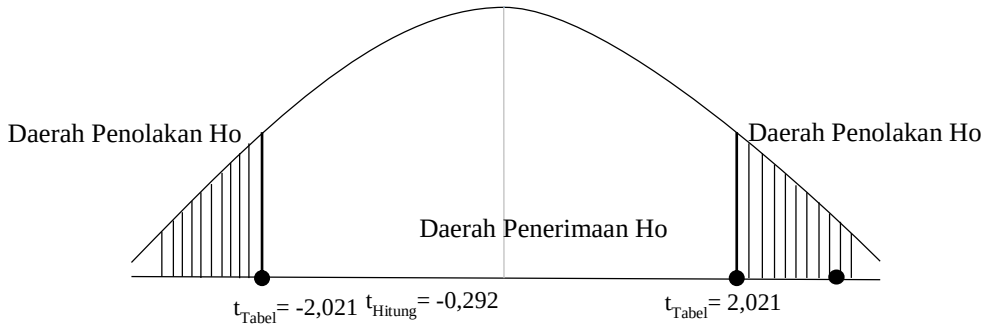
Tabel 4.7
Hasil Hipotesis Profitabilitas terhadap Kebijakan Dividen Secara Parsial

Coefficients(a)

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta	B	Std. Error
(Constant)		.109	4.806		.023	.982
	ROE	-.013	.046	-.032	-.292	.771

a Dependent Variable: DPR

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui nilai t hitung untuk profitabilitas *(ROE)* sebesar -0,292. Nilai ini akan dibandingkan dengan nilai t tabel pada tabel distribusi t. Dengan $\alpha = 0.05/2=0.025$ dengan nilai df = n-k-1 = 48-2-1 = 45. Untuk pengujian dua sisi diperoleh nilai t tabel sebesar ± 2,021. Diketahui bahwa t hitung untuk X_1 sebesar -0,292 berada di antara kedua nilai t tabel (-2,021 dan 2,021), maka Ho diterima artinya profitabilitas secara parsial berpengaruh secara tidak signifikan terhadap kebijakan dividen. Jika disajikan dalam gambar, maka nilai t hitung dan t tabel tampak sebagai berikut:



Gambar 4.18
Kurva Uji Hipotesis Parsial Profitabilitas (X_1) terhadap Kebijakan Dividen (Y)

4.4.1.2 Pengujian Hipotesis Likuiditas Terhadap Kebijakan Dividen Secara Parsial

Selanjutnya, untuk melihat lebih rinci pengaruh secara parsial dari variabel bebas terhadap variabel terikat, berikut disajikan uji hipotesis secara parsial menggunakan uji t.

Hipotesis penelitian yang diuji, akan dirumuskan menjadi hipotesis statistik sebagai berikut:

- Ho : $\rho yx_1 = 0$;
- Ha : $\rho yx_1 \neq 0$;

Hipotesis dalam bentuk kalimat:

Ho : Likuiditas berpengaruh secara tidak signifikan terhadap Kebijakan Dividen

Ha : Likuiditas berpengaruh secara Signifikan terhadap Kebijakan Dividen

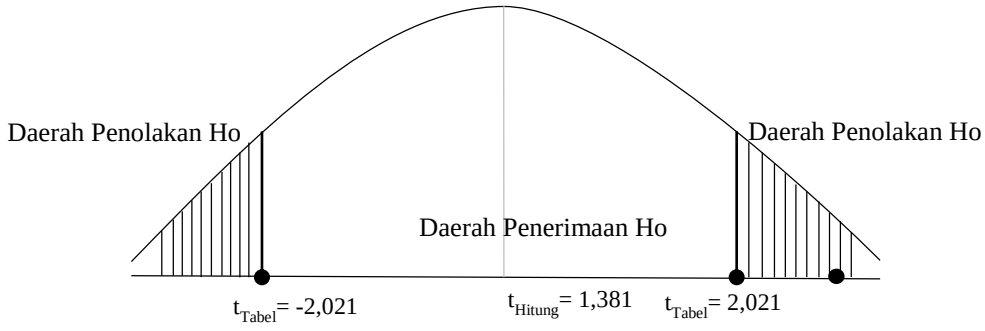
Uji secara individual ditunjukan oleh Tabel *(Coefficients)*. Berdasarkan hasil output SPSS V.15, diketahui nilai t_{tabel} adalah sebagai berikut:

Tabel 4.8
Hasil Hipotesis Likuiditas terhadap Kebijakan Dividen Secara Parsial
Coefficients(a)

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta	B	Std. Error
(Constant)	.109	4.806		.023	.982
CASHRATIO	.649	.470	.153	1.381	.171

a Dependent Variable: DPR

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui nilai t hitung untuk likuiditas *(cash ratio*) sebesar 1,381. Nilai ini akan dibandingkan dengan nilai t tabel pada tabel distribusi t. Dengan α = 0.05/2=0.025 dengan nilai df = n-k-1 = 48-2-1 = 45. Untuk pengujian dua sisi diperoleh nilai t tabel sebesar ± 2,021. Diketahui bahwa t hitung untuk X_2 sebesar 1,381 berada di luar kedua nilai t tabel (-2,021 dan 2,021), maka Ho diterima artinya likuiditas secara parsial berpengaruh secara tidak signifikan terhadap kebijakan dividen. Jika disajikan dalam gambar, maka nilai t hitung dan t tabel tampak sebagai berikut:



Gambar 4.19
Kurva Uji Hipotesis Parsial Likuiditas (X_2) terhadap Kebijakan Dividen (Y)

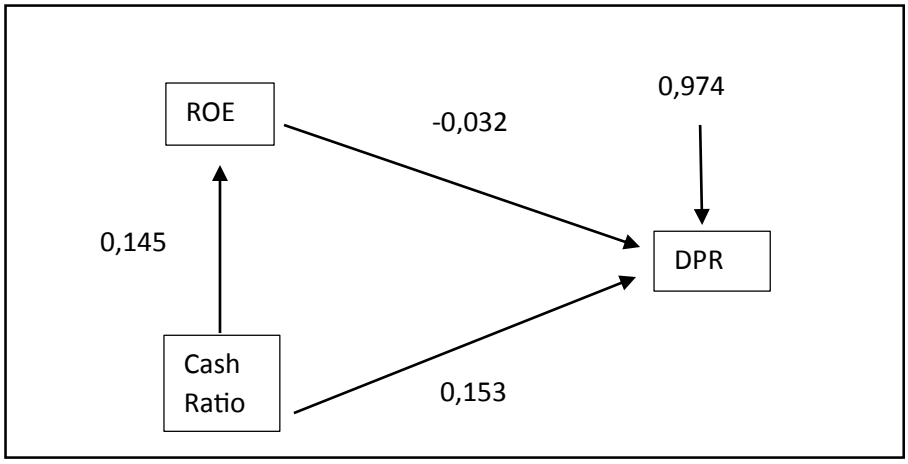
4.4.2 Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil output dari pengolahan data menggunakan software SPSS V.15 *for windows* diperoleh nilai koefisien korelasi antara Profitabilitas (X_1) dengan Likuiditas (X_2) sebesar -0,145 artinya hubungan antara Profitabiltas (X_1) dengan Likuiditas (X_2) sangat rendah. Koefisien korelasi bertanda negatif menunjukkan hubungan Profitabilitas (X_1) dengan Likuiditas (X_2) pada Bank Umum Swasta yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2006 sampai dengan tahun 2011 adalah terbalik, artinya jika

Profitabilitas (X_1) naik maka Likuiditas (X_2) akan turun. Kesimpulannya adalah korelasi antara Profitabilitas (X_1) dengan Likuiditas (X_2) sangat rendah dan terbalik..

2. Berdasarkan hasil output dari pengolahan data menggunakan software SPSS V.15 *for windows* diperoleh nilai koefisien korelasi antara Profitabilitas (X_1) dengan Kebijakan Dividen (Y) sebesar -0,055 artinya hubungan antara Profitabiltas (X_1) dengan Kebijakan Dividen (Y) sangat rendah. Koefisien korelasi bertanda negatif menunjukkan hubungan Profitabilitas (X_1) dengan Kebijakan Dividen (Y) pada Bank Umum Swasta yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2006 sampai dengan tahun 2011 adalah terbalik, artinya jika Profitabilitas (X_1) naik maka Kebijakan Dividen (Y) akan turun. Kesimpulannya adalah korelasi antara Profitabilitas (X_1) dengan Kebijakan Dividen (Y) sangat rendah dan terbalik..
3. Berdasarkan hasil output dari pengolahan data menggunakan software SPSS V.15 *for windows* diperoleh nilai koefisien korelasi antara Likuiditas (X_2) dengan Kebijakan Dividen (Y) sebesar (0,158) artinya hubungan antara Likuiditas (X_2) dengan Kebijakan Dividen (Y) sangat rendah. Koefisien korelasi bertanda positif menunjukkan hubungan Likuiditas (X_2) dengan Kebijakan Dividen (Y)pada Bank Umum Swasta yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2006 sampai dengan tahun 2011 adalah searah, artinya jika Likuiditas (X_2) naik maka Kebijakan Dividen (Y)) akan naik. Kesimpulannya adalah korelasi antara Profitabilitas (X_1) dengan Likuiditas (X_2) sangat rendah dan searah.

4. Berikut ini merupakan gambar dari hasil keselurahn nilai koefisien jalur:



Gambar 4.20
Koefisien Jalur Profitabilitas (ROE), Likuiditas (Cash Ratio) dan Kebijakan Dividen (DPR)